

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

(Studi Kasus Desa Wahau Baru Kabupaten Kutai Timur)

Akhmad Rizal Sutiawan

eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 9, Nomor 3, 2022

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

(Studi Kasus Desa Wahau Baru Kabupaten Kutai Timur)

Akhmad Rizal Sutiawan¹, Heryono Susilo Utomo², Budiman³

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menganalisis strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Wahau Baru Kabupaten Kutai Timur kemudian dilihat dari beberapa indikator Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wahau Baru, yaitu : 1) pengaturan, 2) Pengelolaan, 3) Pemberdayaan Masyarakat. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling, narasumber dengan key informan adalah Kepala Desa Wahau Baru dan informan yang berasal dari Camat Muara Wahau, Kepala Desa, Sekretaris Desa Wahau Baru, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Wahau Baru, Ktua BUMDes / Direktur BUMDes Jaya Mandiri, dan masyarakat Desa Wahau Baru. Penelitian ini berlangsung di Desa Wahau Baru, Kecamatan Kongbeng. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa pelaksanaan strategi Pemerintah Desa untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja asing di dalam negeri melalui pemanfaatan Badan Usaha Milik desa telah berjalan sangat baik dan dapat dicirikan sebagai telah sukses. Hal ini dikarenakan dampak masyarakat yang ditujukan kepada mereka karena memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan tidak dihalangi oleh orang lain, sehingga dapat bercirikan mandiri dan berkembang di Desa Wahau Baru.

Kata Kunci : strategi, pendapatan asli desa, badan usaha milik desa

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: akhmadrizal468@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun ini mengalokasikan anggaran pembangunan sebesar Rp 42 miliar untuk Kecamatan Muara Wahau. Anggaran tersebut dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutim. Luncuran program pembangunan tersebut diserahkan Wabup pada pelaksanaan Musyawara Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Muara Wahau, belum lama ini. Berkaitan dengan itu, Kasmidi meminta Camat untuk berkoordinasi ulang dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain itu, Pemkab Kutim bakal menambah alokasi anggaran Rp 1 miliar demi mempercepat pembangunan. Rp 1 miliar dalam bentuk program tersebut harus dimanfaatkan untuk skala prioritas yang merupakan kebutuhan sangat mendasar. Menurutnya, banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dalam Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa. Sehingga tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja. “ADD dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kecil, yang tidak bisa adalah membangun Kantor Desa, selebihnya bisa”.

Kecamatan Muara Wahau menjadi kecamatan pertama untuk zona pedalaman Kutim, dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri berbagai elemen masyarakat. Pada kesempatan itu, sejumlah Kades mengusulkan daftar prioritas pembangunan sarana prasarana infrastruktur meliputi usulan pembuatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa usulan tersebut di sampaikan oleh Kepala Desa Wahau Baru, kemudian di sampaikan oleh kepala desa lainnya pembangunan gedung PKK, pembangunan Kantor Danramil dan Polsek, pipa air bersih PDAM, semenisasi, pengerasan jalan kebun, pemasangan jaringan PLN, hingga pembangunan drainase kiri kanan jalan desa dan satu lagi usulan pembuatan Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. “Musrembang ini menjadi awal perencanaan program pembangunan desa-desa. Kegiatan itu dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Rupiansyah di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Muara Wahau. Selain Camat Muara Wahau Irang Ajang, kegiatan yang dimulai Selasa (22/2/2017) itu juga dihadiri sejumlah pejabat, seperti Kabag Pemerintahan Setkab Kutim Alexander Siswanto, perwakilan anggota DPRD Kutim, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan deretan kepala desa (kades) desa-desa di Muara Wahau seperti Desa Karya Bhakti, Long Wehea, Wahau Baru, Diaq Lay, Benhes, Dea Beq, Jak Luay, Wanasisari, dan Nehen Liah Bing.

KERANGKA DASAR TEORI

Strategi

Menurut Lynch dalam Wibisono (2006, 50-51) mengemukakan strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat.

Menurut Argyris dalam Rangkuty (2001) mengemukakan strategi merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Wright (1996) mengemukakan strategi merupakan suatu alat atau tindakan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai kinerja yang konsisten dengan misi dan tujuan organisasi

Pemerintahan

Secara umum, pengertian pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Fungsi Pemerintah

1. pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan.
2. pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar kehidupan berjalan lebih harmonis dan dinamis.
3. Pemerintah juga berfungsi sebagai pemacu pembangunan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan mental spiritual warga negara.
4. Fungsi pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah sehingga masing-masing daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Desa

Menurut Inu Kencana dalam Fadilah (2013) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa pemimpin yang mampu

pemerintahan tanpa pendidikan serta karismatik dalam menjalankan roda sebuah pemerintahan. Sedangkan dikatakan disiplin ilmu karena harus memenuhi semua syarat-syarat yang menjadi ketentuan sebuah ilmu, yaitu dapat dipelajari serta diajarkan, memiliki objek materi maupun formal, sistematis dan spesifik serta bersifat universal.

Menurut Soemantri (2011) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Perangkat Desa yakni terdiri dari Sekretaris Desa beserta Perangkat lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis lapangan serta penyelenggaraan unsur kewilayaan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial dan budaya setempat.

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa. Ada beberapa jenis pendapatan asli desa di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa (Transfer), desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu poin b sampai dengan f diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa.
2. Yang terakhir adalah pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (hurup g dan h). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata empower yang memiliki makna adalah *to give official authority or legal power, to make one able to do something* (Junaidin dalam Mutmainna, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan merupakan suatu proses atau cara untuk berdaya, memiliki kemampuan, tenaga dan kekuatan untuk bisa menguasai sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Pemberdayaan adalah suatu usaha dengan tujuan untuk menyejatrahkan masing-masing individu. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses kapasitas atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kapasitas, seseorang akan memiliki kewenangan atau kekuatan (daya) yang dapat diakui secara legal atau official sehingga merasa dihargai harkat dan martannya, serta akan sadar terhadap kekuatan pada dirinya. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki jiwa kemandirian, berkemampuan kreatif, produktif, tahan uji, jujur, pintar, emansipatif, proaktif, tidak bergantung, terbuka,

Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....Sutiawan)

dinamis, serta bertanggung jawab dalam menangani setip masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai tujuan.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan uraian teori dan konsep yang telah dikemukakan di atas, adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
2. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Perangkat Desa yakni terdiri dari Sekretaris Desa beserta Perangkat lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis lapangan serta penyelenggaraan unsur kewilayahan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial dan budaya setempat.
3. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2015:170) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu yang datanya berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari hasil penelitian dengan observasi, wawancara, catatan laporan, dokumentasi dan lain-lain atau penelitian yang mengutamakan deskripsi secara analitik dari suatu peristiwa atau dari proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang sangat dalam hakikat proses tersebut. Model pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu suatu metode penelitian deskriptif menggunakan Studi Kasus sebagai fokus penelitian, yang mengarahkan penelitian kepada tujuan untuk memaparkan dan menggambarkan tentang Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa PAD (Studi Kasus Desa Wahau Baru Kabupaten Kutai Timur)

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain itu tujuan dari lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada pendapatan asli desa dan keuntungan dari unit usaha yang dijalankan unit usaha yang telah dilaksanakan dengan berdirinya lembaga BUMDes membuat pengaruh besar dari berbagai aspek seperti pengembangan perekonomian masyarakat desa untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran dan keterpurukan perekonomian

masyarakat desa dan yang paling terpenting untuk mengembangkan potensi desa secara keseluruhan sesuai dengan apa yang mendominasi di wilayah desa tersebut, dimana pembentukan BUMDes tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyesuaikan keadaan desa wahau baru.

Pengaturan

Pengaturan Pemerintah Desa Wahau Baru yang dimaksud penulis ini adalah suatu pengaturan yang menjadi landasan untuk Pemerintah bersama Instansi yang terkait untuk melakukan strategi maupun usaha agar lebih terpadu dan lebih terarah sesuai dengan perencanaan maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengaturan juga menjadi pedoman penting untuk berbagai instrumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam konteks pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga seluruh program yang akan dilaksanakan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing bidang yang terkait dengan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga peraturan dan kebijakan juga dibuat untuk seluruh masyarakat agar bekerjasama dalam menukseskan program tersebut, kemudian perlu adanya rekonsiliasi antara Pemerintah Desa dengan seluruh lapisan masyarakat, karena hal itu juga berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berada di Kecamatan Muara Wahau tepatnya di Desa Wahau Baru.

Kemudian pemerintah desa membuat suatu kebijakan dimana hal ini dilakukan *check and balance* antara Pemerintah Desa dan BPD. Adapun persetujuan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa yang sekaligus sebagai pengawas untuk membuat sebuah pengaturan, kemudian dari hasil tersebut terciptanya sebuah produk Kebijakan yaitu Badan Usaha Milik Desa (Jaya Mandiri) dari Badan Usaha Milik Desa tersebut membuat sebuah Unit Usaha. Adapun unit usaha yang di kelola BUMDes Jaya Mandiri yaitu unit usaha Plasma Kelapa Sawit dan berkembang membuat unit usaha lagi seperti. unit usaha Suplay Pupuk, unit usaha Sarang Burung Walet, dan unit usaha Toko Sembako/ penyediaan Sembako.

Pengelolaan

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa, kemudian mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat pedesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan investasi lokal, pengalian investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha pedesaan, mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa, menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan. Dalam hal ini perlu adanya akuntabilitas pabrik yang di mana pelaksanaan dilakukan harus sesuai dengan perencanaan. Dalam perencanaan

Pembentukan BUMDes Jaya Mandiri diatur dalam peraturan desa. pendapatan Asli Desa dari Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah disepakati, hal ini dapat dilihat Unit Usaha yang sedang berjalan seperti Plasma Kelapa Sawit, Sarang Walet, Supllai Pupuk, Toko Sembako. Hal ini dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan aturan. Dalam hal ini pembangunan perekonomian masyarakat yang melihat dari potensi desa yang mendominasi di desa Wahau baru seperti perkebunan kelapa sawit mayarakat sehingga menunjang untuk dibentuk nya suatu kebijakan pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki unit usaha plasma kelapa sawit yaitu dengan cara penyediaaan lahan kepada perusahaan Sawit yang menerapkan sistem kerja sama dengan pihak di Desa Wahau Baru dengan sistem bagi hasil hal ini sudah berjalan 4 Tahun terakhir dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut mengalami keuntungan yang sangat signifikan

Adapun dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat beberapa unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Jaya Mandiri antara lain sebagai berikut :

1. Unit Usaha Plasma kelapa Sawit

Dalam pengelolaannya Unit Usaha Ini pemerintah desa menggunakan sistem kerja sama dengan pihak ketiga yang dimana dalam pengelolaan Unit usaha ini desa hanya menyediakan lahan saja dan pihak ketiga plasma kelapa sawit yang menyediakan modal dan perawatan dari kelapa sawit tersebut, kemudian menggunakan sistem swakelola yang di mana pegawai yang bekerja di kebun tersebut dari masyarakat desa Wahau Baru, adapun pembagian dari hasil Plasma Kelapa Sawit ini 70% -30% yang di mana pihak ketiga mendapatkan 70% sebagai pemodal dan pihak bumdes 30%.yang hanya mempunyai lahan.

2. Suplay Pupuk

Pemerintah desa melihat dari potensi yang mendominasi di Desa Wahau Baru yang di mana kebanyakan masyarakat Desa Wahau Baru mempunyai kebun kelapa sawit milik pribadi sehingga Pemerintah Desa berkordinasi dengan BPD dan Direktur Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan unit usaha lagi yaitu Unit Usaha Supplay Pupuk karena melihat dari kebutuhan pupuk yang sangat banyak dan penyediaan pasar yang tidak dapat memenuhi dari permintaan yang ada sehingga sangat menjanjikan jika di bentuk suatu unit usaha supplay pupuk ini. Adapun sistem yang di gunakan dalam pengelolaan Unit Usaha Supplay pupuk yaitu dengan cara BUMDes membeli pupuk di agen dengan menjual kembali kepada masyarakat yang sedikit lebih murah dibandingkan harga yang ada di pasar. adapun kelebihanya dari unit usaha ini yang dapat menarik masyarakat untuk membeli di BUMDes yaitu harganya yang lebih murah, jaraknya tidak jauh, dan pembayaran bisa di cicil.

3. Sarang Burung Walet

Dalam pembentukan Unit Usaha Sarang Burung Walet tidak terlepas dari Potensi yang ada di Desa Wahau baru dari hal tersebut BUMDes Jaya Mandiiri

membuat bangunan sarang burung walet, adapun pembangunannya menggunakan jasa masyarakat desa setempat yang ahli dalam bidang pertukangan/bangunan dan mengerti tentang sarang burung walet, adapun sistem yang digunakan dalam pengelolaan Sarang burung walet dikelola langsung oleh anggota dari BUMDes Jaya Mandiri. mulai dari pembuatan, perawatan hingga panen sarang. sehingga tidak ada campur tangan dari pemerintah desa. Adapun campur tangan dari pihak pemerintah desa hanya sebagai penasehat dan pengawas dari keberlangsungan jalnya sebuah Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri.

4. Penyediaan Sembako

Unit usaha Penyediaan Sembako. melihat kondisi yang ada di Desa Wahau Baru unit usaha ini cukup bagus jika di jalankan dengan benar karena desa tersebut sangat minim sekali toko sembako yg ada di dalam desa tersebut. Dalam pengelolaan unit usaha ini pihak BUMDes menawarkan harga di toko sembako milik BUMDes lebih murah di bandingkan dengan harga di toko milik warga lainya. Untuk kekuranganya di unit usaha ini tidak bisa dibayar nanti atau Bahasa yang sering di sebut di daerah ini adalah Bon, atau yang kita ketahui hutang. Akan tetapi di toko milik masyarakat atau warga di perbolehkan dalam berhutang yang di bayar setiap sebulan sekali Ketika tiba masanya pembayaran hasil dari panen buah sawit. Jadi ada yang menguntungkan bagi pihak masyarakat dan ada juga yang menguntungkan bagi Badan Usaha Milik Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa tentunya tidak terlepas dari masyarakat karena sasaran utama adalah untuk mensejahterakan dan mengurangi angka penganguran dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Wahau Baru sehingga perlu adanya peran dari masyarakat yang sangat besar di dalam Pemberdayaan Masyarakat, Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung yang disebut dengan sistem kerja sama. Adapun kerja sama yang dimaksud adalah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat desa, dan harus mengutamakan masyarakat Desa Wahau Baru sebagai pekerja yang di beri upah baik dalam segi perawatan maupun saat panen buah sawit. Dengan demikian di harapkan dengan output kebijakan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, pendapatan Masyarakat, dan yang terpenting adalah Mengurangi Angka Pengangguran. pendapatan Asli Desa dari Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah disepakati, hal ini dapat dilihat Unit Usaha yang sedang berjalan seperti Plasma Kelapa Sawit, Sarang Walet, Supllai Pupuk, Toko Sembako. Hal ini dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan aturan. Dalam hal ini pembangunan perekonomian masyarakat yang

melihat dari potensi desa yang mendominasi di desa Wahau baru seperti perkebunan kelapa sawit mayarakat sehingga menunjang untuk dibentuk nya suatu kebijakan pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki unit usaha plasma kelapa sawit yaitu dengan cara penyediaaan lahan kepada perusahaan Sawit yang menerapkan sistem kerja sama dengan pihak di Desa Wahau Baru dengan sistem bagi hasil hal ini sudah berjalan 4 Tahun terakhir dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut mengalami keutungan yang sangat signifikan

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Faktor Pendukung

Dalam meningkatkan pendapatan asli desa faktor Pendukung merupakan hal penting untuk ketepatan dan mempercepat berjalanya suatu Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usah Milik Desa adapun faktor tersebut diantaranya.

- a. partisipasi masyarakat dalam sebuah kerjasama antara pihak ketiga dengan Badan Usaha Milik Desa yang mengutamakan masyarakat desa dengan sistem Swakelola dimana dalam sistem ini pemerintah mengusulkan masyarakat Desa Wahau Baru yang harus di utamakan sebagai pekerja di plasma kelapa sawit tersebut, harapanya dalam pelaksanaannya pengelolaan plasma kelapa sawit tersebut masyarakat yang perekonomiannya rendah bisa terbantu dan berkurangnya angka penganguran di desa Wahau Baru.
- b. adanya transparansi terhadap pelaporan dan melakukan revisi terhadap perdes agar pelaporan lebih teratur setiap 3 bulan sekali sehingga pendapatan tersebut tidak dialih fungsikan untuk kepentingan pribadi, karena dengan adanya transparansi masyarakat lebih percaya dan tidak ada rasa curiga terhadap pengelola Badan Usaha Milik Desa tersebut adapun revisi terhadap PerDes yang di lakukan setiap 3 bulan sekali harapanya untuk menyesuaikan kondisi atau keadaan yang ada di desa tersebut dan peraturan dari pemerintah pusat.
- c. kemudian tingginya harga buah sawit bisa mempengaruhi pendapatan dari unit usaha plasma kelapa sawit, semakin tinggi harga buah sawit semakin besar pula hasil yang di peroleh karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan plasma kelapa sawit dengan bagi hasil 70% -30% dari desa hanya menyediakan lahan

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam menjalankan sebuah strategi meningkatkan pendapatan asli desa tentunya harus diperhatikan karena dengan adanya penghambat membuat keberlangsungan BUMDes menjadi kendala dengan tidak sesuai dengan target kemudian munculnya sebuah penghambat ini akibat dari kurang tepatnya sebuah strategi, adanya kemunculan penghambat ini dikarenakan syarat yang perlu diperhatikan agar sebuah strategi dapat di lakukan tetapi kurang mendapat perhatian. Adapun yang peneliti ketahui faktor penghambat yang ada di dalam sebuah strategi tersebut seperti,

- a. turunya harga buah sawit dapat juga mengurangi hasil dari Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri, karena dalam unit usaha kelapa sawit harga sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan hasil dari BUMDes Jaya Mandiri melalui unit usaha plasma kelapa sawit.
- b. kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait swakelola yang dilakukan pihak ketiga akibatnya ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui sehingga masih ada masyarakat yang masih belum merasakan dampaknya, karena dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja kembali maka masyarakat yang belum mendapat pekerjaan akan mengetahui dan setiap tahun pasti ada pemuda yang lulus sekolah kemudian bisa melamar pekerjaan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut.
- c. kemudian kurangnya skil dari pengelola bumdes sehingga perlu adanya pelatihan yang lebih lanjut dan bimtek yang intensif terhadap pelaporan hasil BUMDes.tidak menutup kemungkinan dalam pelaporan dalam segi apapun baik dalam pengembangannya maupun bentuk pelaporannya semakin tahun maka akan semakin canggih dan maju sehingga perlu adanya pelatihan dan bimtek terhadap pengelola BUMDes tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah Desa Wahau Baru menyesuaikan peraturan desa Nomor 06 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. dimana melalui peraturan ini camat, kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengawasi badan usah milik desa. dalam peraturan desa tersebut, maka dengan cara melakukan evaluasi 3 bulan sekali terhadap pemasukan dan pengeluaran pendapatan asli desa, hal ini terlihat dari unit usaha yang berjalan di Desa Wahau Beru Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri.Selain itu, adanya transparansi dalam pelaporan yang di ketahui seluruh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa Wahau Baru yang disampaikan dalam setiap rapat Triwulan (pertigabulan) oleh Direktur BUMDes (ketua BUMDes) Jaya Mandiri dari hasil Badan Usaha Milik Desa yang di mana Unit usahanya terdapat Sarangburung Walet, Plasma Kelapa Sawit, suplay pupuk dan toko sembako

Adapun pengelolaan dari strategi dari pihak pemerintah desa, yaitu dengan menerapkan sebuah Akuntabilitas pabrik yang mana di dalam Akuntabilitas pabrik itu ada Transparansi, partisipatif, tertib, dan musyawarah dilakukan untuk perencanaan dan evaluasi dari hasil kebijakan yang di buat apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang berdasarkan kesepakatan Bersama, untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Adapun dari pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa memberi gagasan yaitu dengan Sistem Kerja Sama, yang saling menguntungkan antara pemerintah desa dan pihak

Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....Sutiawan)

ketiga (perusahaan) yaitu dengan cara wajib mengutamakan masyarakat Desa Wahau Baru Sebagai Pekerja di pelasma kelapa sawit Tersebut. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat, dilakukan secara sistem kerja sama bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang rendah.

Saran

Adapun saran dari penulis terkait Strategi Pemerintah Desa Wahau Baru dalam meningkatkan pendapatan aslu Desa sebagai berikut.

1. Desa Wahau Baru merupakan Desa pertama yang memiliki BUMDes, oleh karena itu sebaiknya pemerintah desa lebih giat lagi dalam melakukan sebuah pelatihan terhadap kepala bumdes dan anggota bumdes, agar dalam pelaksanaanya lebih tertata lagi dan dapat di contoh oleh desa lain yang ada di Kecamatan Muara Wahau.
2. Adapun peraturan BUMDes yang dibuat harusnya selalu direvisi melihat dari perkembangan dan situasi yang ada di tempat tersebut, sehingga dalam pelaporan dari BUMDes lebih baik lagi.
3. Melihat dari Kerjasama yang dilakukan oleh pihak BUMDes dengan pihak ketiga untuk menjalankan unit usaha plasma kelapa sawit yang mana di dalamnya terdapat sistem kerja sama. ini memng sangat membantu sekali tapi yang perlu diperhatikan disini adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program tersebut, maka harus adanya peran dari pihak ketiga untuk memberikan sosialisasi terkait system tersebut.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro, Soemirat. (2007). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung. Simbiosa Rekatama.
- Fadillah, R. (2013). *Strategi Pemerintah daerah dalam meningkatkan semangat wirausaha di kelurahan tettikenrarae kecamatan mariorowawo kabupaten soppeng*: Skripsi Unismuh Makassar. (Dipublikasikan)
- Hermawan, Endang, dkk. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangun Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol 2 (1), 191-197.
- Milles,M.B, Huberman, A.M, Seldana,J.(2014).*Qualitative Data Analysis A Metodes Sourcebook, Edition, Ul-press*.
- Mutmainna, I., Hakim, L., & Saleh, D. (2016). *Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 268-283.
- Ramdana, Fitria. (2020). *Strategi Pemerintahan Desa Dalam mengembangkan Kampung Sabbeta di Desa Pissing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. (Dipublikasikan)

- Ulumiyah, I. (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, 1(5), 890-899.
- Rozaki, Abdur. (2019). *Memberdayakan Desa melalui Parawisata berbasis Bumdes*. Asosiasi Dosen Pengembang Masyarakat (ADPEMAS) Forum Komunikasi Dosen Peneliti (FKDP). Vol 3 (1), 1-20
<https://doaj.org/article/1a02bffa71a84c1a8c5095a2ca41525a>
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kulitatif*. Bandung : Alfabeta.